

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

1. Pengertian

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. ¹Dalam Al Qur'an kata daya di sebut sebagai "al-Quwwah", dalam berbagai variannya, disebut 33 kali.² Dalam bahasa arab disebut "al-Quwwah", dalam bahasa Inggris disebut "*empower*" yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam sleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik mengatakan bahwa pemberdayaan adalah:

Suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus-menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.³

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242

²Muhammad Fuad al-Baqi', *Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Quran al-Karim*, t.t, DAR Alfikr, hlm. 587-558

³Hatta Abdul Malik, *Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, (Semarang: LPM IAIN Walisongo, 2012), hlm. 193

yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴ Berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi yang memenuhi pekerjaan mereka. Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai ketrampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Seorang karyawan memiliki wewenang dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu, jauh melebihi tugasnya sehari-hari.

Robbins yang dikutip pada buku “Manajemen Kinerja” memberikan pengertian yaitu:

Pemberdayaan sebagai menempatkan pekerja bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Dengan demikian, manajer belajar untuk berhenti mengontrol dan pekerja belajar bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaannya dan membuat keputusan yang tepat. Pemberdayaan dapat mengubah gaya kepemimpinan, hubungan kekuasaan, cara pekerjaan dirancang, dan cara organisasi distrukturkan.⁵

Pemberdayaan merupakan suatu proses dimana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonomi dan keleluasan dalam hubungannya dengan

⁴Daniel Sukalele, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 17.03

⁵Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 340

pekerjaan mereka. Pemberdayaan merupakan kontinum antara keadaan pekerja yang tidak mempunyai kekuatan untuk mempertimbangkan bagaimana mengerjakan pekerjaan, sampai pada keadaan di mana pekerja memiliki kontrol sepenuhnya atas apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dengan pemberdayaan, telah terjadi pergeseran kekuasaan kepada tim pekerja yang diperbolehkan membuat keputusan sendiri.

Sementara itu, Newstrom dan Davis yang dikutip pada buku “Manajemen Kinerja” menyatakan bahwa :

Pemberdayaan merupakan setiap proses yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja.⁶

Maka, pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih terberdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.

Pemberdayaan dapat mendorong orang untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan dalam organisasi. Dengan demikian, akan meningkatkan kemampuan dan rasa memiliki, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga kinerjanya meningkat. Pekerja yang diberdayakan

⁶ Ibid, hlm. 344

diharapkan melakukan pekerjaan melebihi tanggung jawab yang diberikan kepada mereka.⁷

Pemberdayaan yaitu aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.⁸ Pentingnya pembangunan masyarakat menitik beratkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.⁹

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.

⁷Ibid, hlm. 349

⁸ Onny. S. Prijono, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 97

⁹ Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Falah Production, 2001), hlm, 256

Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah yang lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.¹⁰

2. Perlunya Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan elemen vital dalam lingkungan bisnis modern. Dengan pemberdayaan, bisnis menjadi lebih dekat dengan pelanggan, dapat memperbaiki pelayanan pengirim barang, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya memenangkan kompetisi.

Hal tersebut tidak mungkin terjadi sampai organisasi menemukan cara memberdayakan orangnya. Smith memandang ada dua hal yang

¹⁰ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31

menyebabkan perlunya pemberdayaan. Pertama, adalah karena karena lingkungan eksternal telah berubah sehingga mengalihkan cara bekerja dengan orang di dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis di abad ke-21 bekerja dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang tidak dapat diduga.

Terdapat empat faktor yang menyebabkan , yaitu sebagai berikut :

1. Semakin intensnya kompetisi sehingga organisasi perlu memberdayakan orang untuk melawan tantangan kompetisi.
2. Inovasi teknologi berubah cepat sehingga organisasi perlu memberdayakan orang lain untuk menggunakan sebaik mungkin teknologi maju.
3. Permintaan yang tetap atsa kualitas yang lebih tinggi dan nilai yang lebih baik menyebabkan organisasi perlu memberdayakan orang untuk menemukan cara inovatif guna memperbaiki produk dan jasa.
4. Tumbuhnya masalah ekologi menuntut organisasi perlu memberdayakan orang untuk melaksanakan kebijakan ekologi.

Kedua adalah karena orangnya sendiri berubah. Sejak lama manajer memandang orang sebagai sumber daya yang paling berharga. Akhirnya, keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi lebih tergantung pada bakat

dan kecerdasan orangnya daripada pada faktor tanah, bangunan, pabrik, dan mesin. Pekerja benar-benar menjadi *intellectual capital* organisasi.¹¹

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang menjadi inti dalam memberdayakan masyarakat yaitu :

- a. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/media yang dipandang efektif.
- c. Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap *bargaining power* masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.
- d. Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.¹²

¹¹Wibowo, *Manajemen Kinerja*.....hlm. 352

¹² Suparjan, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), hlm. 49

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

3. Manfaat Pemberdayaan

Apabila suatu organisasi menjalankan pemberdayaan, di kalangan anggota organisasi akan tumbuh perasaan menjadi bagian dari kelompok. Tumbuh perasaan puas dalam mengambil tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya. Terdapat perasaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berharga dan memperoleh kesenangan dalam melakukan komunikasi dan kerjasama dengan orang lain.

Dengan demikian, pemberdayaan meningkatkan percaya diri dalam melakukan sesuatu. Akibatnya akan terjadi peningkatan kepuasan kerja,

kerjasama yang lebih dekat dengan orang lain, bekerja dengan tujuan yang lebih jelas, dan mendapatkan prestasi apabila tujuan tercapai. Pengakuan merupakan penghargaan sehingga menyebabkan orang yang bekerja melihat sinar baru dan lebih menghargai.

Bagi organisasi, pemberdayaan akan meningkatkan kinerja organisasi dan individu yang dapat mengembangkan bakatnya secara penuh. Departemen atau tim menjadi lebih antusias, aktif, dan sukses. Karyawan menguasai pemahaman dan keterampilan baru dan dengan memberi kesempatan melihat sesuatu dengan cara berbeda, merefleksikan apa yang dilihat dan mengembangkan keterampilan baru.

Sementara itu, manajer terdorong untuk bekerja lebih keras, di samping harus mengerjakan pekerjaan rutin, yaitu berhadapan dengan masalah dan krisis dalam memberdayakan karyawannya. Perkembangan karier akan memberi kontribusi lebih besar pada keberhasilan jangka panjang organisasi dan meningkatkan prospek untuk memperoleh promosi.

Dalam situasi di mana organisasi kinerjanya rendah, produktivitas atau profitabilitas, akan meningkat apabila manajer memberdayakan karyawannya.¹³

4. Hambatan Pemberdayaan

Banyak organisasi yang gagal memperbaiki diri karena manajer yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perubahan tidak peduli atas masalah

¹³Ibid, hlm. 353

yang dihadapi. Sementara itu, orang yang berada di garis depan, yang memahami persoalannya, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu. Sering kali suatu organisasi membayar konsultan dengan mahal untuk memberitahu mereka bagaimana memperbaiki proses pekerjaan, padahal bawahannya dapat melakukannya.

Suatu keinginan untuk melakukan pemberdayaan sering kali menghadapi banyak resistensi. Di satu sisi terdapat perasaan takut karena tidak pernah melakukan sebelumnya atau mungkin merasa telah pernah melakukan langkah pemberdayaan sebelumnya, namun tidak berjalan seperti diharapkan. Dengan demikian, muncul pandangan bahwa pemberdayaan pada organisasinya tidak akan berjalan sehingga tidak merasa perlu berubah karena keadaan sekarang dirasakan baik saja.¹⁴

5. Membuat Orang Merasa Terberdayakan

Memberdayakan bawahan merupakan hal yang sangat penting, namun baru akan memberikan hasil apabila terdapat hubungan baik atasan dan bawahan. Hubungan baik akan dapat memberdayakan orang karena mendorong komunikasi reguler dan terbuka. Saran setiap orang akan didengar dan dipertimbangkan dan dapat memahami setiap kekurangan keahlian.

Sebaliknya, hubungan buruk akan menghalangi pemberdayaan karena mencegah orang lain mendapat informasi tentang pembangunan dan

¹⁴Ibid, hlm. 354

kemajuan, menumbuhkan permusuhan dan ketidakpercayaan di antara individu, yang mungkin mencegah orang yang tepat bekerja bersama. Kesulitan dalam membuat keputusan karena konflik tidak dapat diselesaikan dengan akibat frustrasi dan hilangnya moral bawahan.

Untuk itu, langkah yang harus dilakukan manajer adalah dengan mencoba menciptakan hubungan di mana anggota tim merasa dihargai, di mana mereka dapat mengambil risiko, dan belajar bagaimana menjadi percaya diri. Dengan demikian, akan menghilangkan perasaan ketergantungan pada orang lain.

Menghilangkan ketergantungan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- Memberikan apresiasi atas apa yang dicapai anggota tim,
- Bersikap jujur dan terbuka kepada bawahan,
- Bersedia mengambil sikap positif dalam semua tindakannya, dan
- Mampu memberikan dorongan kepada orang lain.¹⁵

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke masa kinian yang telah umum digunakan.

¹⁵Ibid, hlm. 356

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.¹⁶

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁷

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.¹⁸

C. Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan

¹⁶Sumodiningrat, Gunawan *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pawira, 1997), hlm: 74

¹⁷Lifa Indri Astuti, Dkk, Jurnal “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi pada Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)*”, hlm:12

¹⁸Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 83

melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, inilah yang membedakan partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah di elu-elukan sebagai suatu yang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintah secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good governance adalah tata pemerintah yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.¹⁹

D. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Prespektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tjokowinoto yakni :

Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan menggunakan pendekatan cetak biru (*blueprint*) atau pendekatan yang datangnya dari atas. Dengan pendekatan ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapam program, masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. sehingga

¹⁹Anisa Hartiwi Wulandari, Jurnal “*Strategi Penggunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 37

makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk menacapai yang diinginkan. Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memapukan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar.²⁰

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga tidak lagi harus diidentifikasi sebagai kelompok sasaran. Harus memandang mereka sebagai pemanfaatan yang diharapkan. Merekalah yang diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.²¹

Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat penerima (*beneficiaries*) mempengaruhi arah

²⁰Tjokowinoroto, Moeljarto, *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah Strategi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000),hal: 44-45

²¹Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, t.t), hal:461

dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.

E. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.²²

²²Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 17.03

2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi,
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran,
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi,
4. Kooptasi sitem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, masyarakat yang berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).²³

²³Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiya Press, 2000), hlm. 1-2

F. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) dalam pengertian sempit adalah koperasi yang anggotanya meliputi masyarakat pedesaan. KUD adalah salah satu lembaga dipedesaan yang pada saat ini dirasakan sebagai wadah yang setidaknya mampu memperlancar keberhasilan dan tercapainya program-program yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain Koperasi Unit Desa dapat diartikan sebagai gabungan usaha bersama koperasi-koperasi desa yang terdapat di wilayah unit desa.²⁴

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut Chanago yang dikutip pada buku “Dinamika Koperasi” yaitu KUD harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan yaitu :

1. Perkreditan
2. Penyediaan dan penyaluran-penyaluran sarana-sarana produksi
3. Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi dari para anggota KUD dan warga desa umumnya
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.

²⁴Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 77

5. Dalam melaksanakan tugas KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang menyaingi anggotanya sendiri.²⁵

Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.²⁶

Koperasi Unit Desa suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. menurut intruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran serta merata dengan tujuan masyarakat yang adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan

²⁵Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm: 27

²⁶Ritongga, *Koperasi Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 17

di bidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan.²⁷

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjamin berkembangnya demokrasi, maka satu-satunya alat ekonomi dan sosial yang mengandung nilai-nilai kedemokrasian itu adalah koperasi, yang di pedesaan berkat dorongan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah dibentuk oleh warga desanya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD).²⁸ KUD menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan salah satu kelembagaan agribisnis dalam mendukung pengembangan sistem agribisnis di pedesaan. Agar KUD dapat melakukan peranannya dengan baik, maka KUD dikelola dengan produktif, efektif, dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lain.²⁹

Koperasi Unit Desa di bentuk berdasarkan intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 yang merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa. Kemudian Inpres Nomor 4 Tahun 1973 itu disempurnakan oleh Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi ekonomi. Selanjutnya Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang pembinaan dan

²⁷ Ibid, hlm 18

²⁸ Bunga Rosavinda, Jurnal “*Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus KUD “Sri Among Tani” Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*”, hlm. 5

²⁹ Ritonga, *Koperasi Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 20

pengembangan KUD. Pembentukan Koperasi Unit Desa di dahului dengan berdirinya BUUD/KUD (Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa) yang mendasarkan pada inpres No. 4 Tahun 1973.

Tujuan dari pembentukan Koperasi Unit Desa adalah :

- a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.
- b. Memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.³⁰

Sesungguhnya mendahului berdirinya BUUD/KUD ini yang mendasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 1973, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 1971 telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 32/1971 bagi pendirian suatu BUUD Percobaan, cita-cita mana di dukung oleh Bank Rakyat Indonesia dan para peneliti dari Universitas Gajah Mada.

Dalam perkembangannya dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan peran dari KUD dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, dikeluarkanlah serangkaian ketentuan-ketentuan dari pemerintah baik yang berupa Instruksi Presiden maupun Instruksi/Kebijakan

³⁰ Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm: 42

Menteri, di antaranya Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa. Keluarnya Inpres No.4 Tahun 1984 itu diikuti oleh beberapa Keputusan/Instruksi Menteri Koperasi diantaranya keputusan tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan KUD (Keputusan Menteri No. 84/KPTS/VI/1984) dan Instruksi tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri (Instruksi Menteri Koperasi No. 04/INST/M/VI/1988). Dalam Instruksi Menteri ini dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan dan pengembangan KUD Mandiri adalah terwujudnya KUD yang memiliki kemampuan manajemen yang terbuka dan rasional dalam pengembangan ekonomi para anggotanya atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD.

Untuk itu kepada KUD diuntut memiliki kemampuan pokok yang meliputi:

- a. Kemampuan melaksanakan manajemen yang terbuka dan rasional dalam mengelola organisasi serta usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
- b. Kemampuan menggerakkan, memadukan dan mengembangkan sumber daya dan kemampuan para anggota dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
- c. Kemampuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta gairah masyarakat pedesaan menjadi anggota KUD yang berpartisipasi aktif pada

semua tingkat kegiatan KUD, terutama dalam proses pengambilan keputusan.³¹

Selanjutnya oleh Direktur Jenderal Koperasi pada tanggal 25 Agustus 1986 dikeluarkan Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengembangan KUD mandiri, dimana di antaranya mengatakan bahwa suatu KUD itu dapat dinyatakan mandiri, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai anggota penuh minimal 25% dari jumlah anggota penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD daerah kerjanya.
2. Dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha anggota maka pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha KUD secara keseluruhan,
3. Minimal 3 tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan tepat waktunya sesuai petunjuk dinas.
4. Anggota Pengurus dan Badan pemeriksa semua berasal dari anggota KUD dengan jumlah maksimal untuk Pengurus 5 Anggota dan Badan Pemriksa 3 orang.
5. Modal sendiri KUD minimal Rp 25 juta.
6. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan.
7. Batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha KUD (Program dan Nonprogram) sebesar 20%.
8. Rasio Keuangan:

³¹ Ibid, hlm 50

Likuiditas, antara 150% s/d 200%

Solvabilitas, minimal 100%

9. Total volume usaha proporsional dengan jumlah anggota dengan minimal rata-rata Rp 250.000,- per anggota per tahun.
10. Pendapatan kotor minimal dapat menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi.
11. Sarana usaha layak dan dikelola sendiri.
12. Tidak ada penyelewengan dan manipulasi yang merugikan KUD oleh pengelola KUD.
13. Tidak mempunyai tunggakan.³²

Perkembangan dari unit usaha di KUD masih relatif kecil susunan personilnya dan masih sederhana, wewenang dan tanggung jawabnya masih kecil. Akan tetapi kalau unit usaha sudah besar dan kegiatannya sudah meluas, maka susunan personil tersebut disesuaikan dengan banyaknya volume kegiatan dan bagian-bagian. struktur unit usaha terdiri dari bagian-bagian personil yang disusun menurut fungsi dan tugas untuk menunjukkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil sesuai dengan bagian-bagiannya. Serta tata hubungannya di dalam unit usaha, personil yang menduduki jabatan dinilai berdasarkan kemampuan dan kecakapan masing-masing personil.³³

Batas wewenang dan tanggung jawab tergantung pada ruang lingkup tugas masing-masing personil dalam unit. Artinya masing-masing karyawan harus

³² Ibid, hlm 56

³³ Ritonga, *Koperasi Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 25

dapat mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya sesuai tugas yang dilaksanakannya. Susunan struktur unit usaha disusun menurut keadaan yang berdasarkan fungsi pokok unit usaha yang sedang dijalankan dan disusun menurut kebutuhan serta bisa dirubah disesuaikan menurut bagian yang bisa ditambah. Susunan struktur unit usaha baik volumenya masih kecil maupun sudah besar, dasar penyusunan strukturnya adalah sama, yang bertitik tolak pada fungsi pokok unit usaha itu sendiri. Artinya apa yang menjadi fungsi pokok unit tersebut itulah yang menjadi bagian-bagian dari unit.³⁴

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Justina Nuriati Purba, pendekatan dari penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Simalungun, temuan pada penelitian ini menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik. Namun dalam tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat kurang terlibat karena sikap masyarakat yang susah diajak bergotong-royong sehingga harus melibatkan pihak ketiga.

³⁴ Ibid, hlm 30

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang saya ambil adalah sama-sama berfokus pada pemberdayaan masyarakat namun pada penelitian saya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Perbedaannya pada penelitian ini mengambil suatu dimensi yang lebih khusus yang menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat dengan studi tentang Program Pembangunan Bantuan Nagori/Kelurahan (BPN/K) dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan mengambil dimensi tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ayu Barombo yaitu pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi Credit Union (CU). Pada penelitian ini mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh CU selain itu juga untuk mengetahui bentuk-bentuk produk yang diberikan kepada para anggotanya. CU yang mempunyai prinsip menyejahterakan anggotanya dengan mengedepankan anggotanya selaku pelaku ekonominya. Selain itu pada penelitian ini penulis mengatakan bahwa dengan peningkatan kesejahteraan/pendapatan maka terjadi pula perubahan nilai kehidupan sosial di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan hasil kerja keras yang dilakukan oleh seseorang yang akan membuahkan keberhasilan. Keberhasilan ini berdampak pada perubahan-perubahan baik dalam diri pribadinya maupun lingkungan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa namun perbedaannya pada penelitian ini objek yang digunakan adalah koperasi Credit Union (CU) yang dalam pelaksanaannya berbeda dengan Koperasi Unit Desa (KUD), pada koperasi Credit Union (CU) sama saja dengan koperasi biasa yang memberikan pinjaman dan permodalan, sedangkan pada Koperasi Unit Desa (KUD) tidak hanya simpan pinjam melainkan banyak unit yang lain salah satunya pada bidang pertanian.

3. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sulistyو yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk istri nelayan di Sendang biru melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang mengatakan bahwa masyarakat pesisir di Sendangbiru merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi ekonomi lemah. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Sendangbiru diperlukan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian istri nelayan yang didampingi oleh KUD Mina Jaya. Pada penelitian ini penulis mengatakan program pemberdayaan dapat diwujudkan melalui kemandirian para istri nelayan. Dalam upaya program pemberdayaan para istri nelayan terdapat agen yang akan mendampingi dan akan menjadi fasilitator yang bersifat multidisiplin yaitu KUD Mina Jaya yang dapat memberikan akses modal, teknologi penangkapan maupun barang kebutuhan sehari-hari.

Pada penelitian ini hanya sedikit berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu pada penelitian ini terfokus pada pemberdayaan istri nelayan di daerah pesisir, sedangkan pada penelitian saya terfokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan.

4. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kesi Widjajanti yang mengatakan bahwa keberadaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Pada penelitian ini mengaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan factor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan warga masyarakat dan merumuskan model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lokasi.
5. Penelitian dilakukan oleh Jack Mangowal, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini Jack Mangowal mengatakan bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek

kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pemberdayaan dianggap penting dalam meningkatkan taraf hidup, tingkat kesejahteraan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Kelebihan pada penelitian ini yaitu, karena pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat tani dalam meningkatkan perekonomian, maka pembahasan yang dilakukan sangat jelas dan terstruktur.

6. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Laila Rosita bahwa dengan adanya Koperasi Unit Desa diharapkan dapat memudahkan anggota dan masyarakat untuk mencari pinjaman modal dan tanpa bunga yang tinggi, karena koperasi ini adalah usaha bersama yang mementingkan pada kebersamaan, yang tidak mengadakan suatu yang hanya penumpukan modal yang sebesar-besarnya, seperti yang berlaku pada perusahaan. Selain untuk mengadakan pinjaman modal untuk anggota dan masyarakat koperasi juga mengadakan waserda, penyediaan pupuk, penyediaan obat-obatan tanaman, juga transportasi untuk penjualan hasil produksi.
7. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arum Purbasari yaitu Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kelinci di Balai Belajar Bersama Hj. Mudikrah Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Dengan tujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program ternak kelinci, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaan program ternak kelinci. Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Pelaksanaan program ternak kelinci dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelatihan pelaksanaan dalam program ternak kelinci ini dapat memberdayakan masyarakat kemudian dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh warga masyarakat.
- b. Faktor pendukung yaitu : respon positif masyarakat, adanya dukungan dari dinas pendidikan dan peternakan, adanya kerja sama dari berbagai instansi pemerintah dan potensi alam yang memadai.
- c. Faktor penghambat : kurangnya pengetahuan warga belajar tentang penanggulangan cuaca yang ekstrim.